



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana bentuk otonomi yang dikembangkan dengan tegas dijelaskan kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah diperlukan kamandiran keleluasaan prakarsa sendiri dalam mengelola Sumber Daya Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat daerah melalui beberapa langkah-langkah dalam penyelenggaraan pembangunan.

Dalam rangka pelaksanaan/penyelenggaran Otonomi Daerah diwajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melalui Laporan Kinerja (LK) sesuai dengan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Menindak lanjuti keputusan tersebut diatas, sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kerja, maka Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara merasa berkewajiban membuat Laporan Kinerja Tahun 2016 dengan tepat, jelas dan legitimitis, sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.



Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.34 Tahun 2006 tentang Jalan mengamanatkan bahwa Kewenangan Pembinaan Jalan Provinsi diserahkan kepada Pemerintah Provinsi, sedangkan Kewenangan Pembinaan Jalan Nasional diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, c/q. Direktorat Jenderal Bina Marga, untuk Provinsi Sumatera Utara, ditangani oleh Balai Besar Jalan Nasional di Medan.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44 / 31 / KPTS / 2012 Tanggal 19 Januari 2012 tentang penetapan ruas-ruas jalan dalam jaringan sekunder menurut fungsinya sebagai jalan kolektor 2 dan kolektor 3 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44 / 30 / KPTS / 2012 Tanggal 19 Januari 2012 tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai Jalan Provinsi ditetapkan bahwa panjang ruas jalan Provinsi yang berada di Sumatera Utara adalah sepanjang 3.048,50 Km (144 ruas jalan) dan Jembatan sepanjang 13.505,5 M (938 buah jembatan)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 3 Tahun 2001 yang menjadi tugas Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Membina Jalan dan Jembatan pada ruas strategis dengan status pembinaan Provinsi
2. Membina Jalan dan Jembatan pada ruas jalan dengan status dekonsentrasi sebagai tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat

Dalam pelaksanaan Penanganan Jalan Provinsi sepanjang 3.048,50 Km dilaksanakan oleh 17 (tujuh belas) Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) yang ditetapkan berdasarkan Pergub Nomor 8 Tahun 2011 termasuk UPTD Peralatan dan



UPTD Balai Pengujian dan Pengendalian Mutu. Untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang periode 2013 – 2018 mengacu dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional periode 2005 – 2025, RPJMN, RPJP Daerah dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara.

Dalam rangka mensejahterakan rakyat/masyarakat Sumatera Utara harus memiliki penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan ekonominya, sehingga hasil kerjanya dapat memiliki nilai tambah disamping mengurangi biaya ekonomi tinggi yang selama ini menjadi beban yang harus dikeluarkannya. Berbagai macam aktivitas dan kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya, misalnya sebagai petani, pekebun, nelayan, pedagang, buruh, pengusaha, pegawai. Hampir kesemuanya membutuhkan transportasi, hampir 90 % menggunakan transportasi darat yang nota bene membutuhkan infrastruktur jalan.

Pada saat ini kondisi infrastruktur Jalan Mantap di Provinsi Sumatera Utara sebesar 80,83 %, masih ada 14,17 % yang harus menjadi prioritas penanganan sesuai dengan target yang dicanangkan oleh Gubernur Sumatera Utara bahwa pada tahun 2018 kondisi Jalan Mantap di Provinsi Sumatera Utara sebesar 95 %.

Gubernur Sumatera Utara periode 2013 – 2018 dalam penyampaian Visi dan Misinya menyatakan bahwa salah satu yang menjadi Visinya “***Menjadi Provinsi Yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera***” untuk mewujudkan Visi tersebut maka sarana dan prasarana infrastruktur jalan dan jembatan di Sumatera Utara harus baik. Mengingat panjangnya ruas jalan di Provinsi Sumatera Utara maka harus dibuat



Grand Design sebagai strategi agar skala prioritas penanganannya dapat di pertajam dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara.

1.2. Struktur Organisasi

Untuk mewadahi pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, disusun Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Program
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Kepala Bidang Pengaturan dan Evaluasi
 - 1) Seksi Pengaturan
 - 2) Seksi Pengawasan
 - 3) Seksi Pengendalian dan Evaluasi
- d. Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan
 - 1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan
 - 2) Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan
 - 3) Seksi Administrasi Teknik
- e. Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - 1) Seksi Pemeliharaan Jalan
 - 2) Seksi Pemeliharaan Jembatan
 - 3) Seksi Administrasi Teknik
- f. Kepala Bidang Pembinaan Teknik
 - 1) Seksi Teknologi Jalan dan Jembatan
 - 2) Seksi Perizinan
 - 3) Seksi Administrasi Teknik



g. Unit Pelaksana Teknis meliputi :

- 1) UPTD Balai Pengujian dan Pengendalian Mutu
- 2) UPTD Peralatan
- 3) UPTD Medan
- 4) UPTD Binjai
- 5) UPTD Tebing Tinggi
- 6) UPTD Kabanjahe
- 7) UPTD Sidikalang
- 8) UPTD P.Siantar
- 9) UPTD Tarutung
- 10) UPTD Dolok Sanggul
- 11) UPTD Sibolga
- 12) UPTD Sidempuan
- 13) UPTD Kotanopan
- 14) UPTD Gunung Tua
- 15) UPTD Rantau Prapat
- 16) UPTD Tanjung Balai
- 17) UPTD Gunung Sitoli

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Organisasi Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara didasarkan pada Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara serta Keputusan Gubernur Sumatera Utara, Nomor : 9 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Tugas Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah/Kewenangan Provinsi, dibidang Pengaturan dan Evaluasi, Pembinaan, Pembangunan dan Peningkatan, Pemeliharaan Pemanfaatan Kebinamargaan



serta tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Sekretariat, Pengaturan dan Evaluasi, Pembinaan, Pembangunan dan Peningkatan, Pemeliharaan Pemanfaatan Kebinamargaan
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum di bidang Pengaturan dan Evaluasi, Pembinaan, Pembangunan dan Peningkatan, Pemeliharaan Pemanfaatan Kebinamargaan
- c. Pelaksanaan Pemberiaan Perizinan di Bidang Kebinamargaan
- d. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Kebinamargaan
- e. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Kebinamargaan
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh :

(2) Sekretariat;

- A. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dibidang urusan umum, Keuangan dan Program
- B. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:



- a. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaporan dinas ;
- b. Penyelenggaraan Pengkoordinasian dengan kepala bidang terkait untuk penyusunan konsep perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang ;
- c. Pengkoordinasian dan penyampaian DPA dan RKA Dinas ;
- d. Penyusunan program urusan umum, keuangan, kepegawaian, hukum dan organisasi dinas ;
- e. Penyelenggaraan Perencanaan kebutuhan barang unit dan kebutuhan administratif Dinas serta penyempurnaan manajemen administrasi sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan ;
- f. Penyelenggaraan Perencanaan, pengelolaan dan peningkatan pendayagunaan pegawai, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan ;
- g. Penyelenggaraan Perencanaan, pengelolaan dan pengurusan pertanggung jawaban keuangan dinas sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan ;
- h. Penyelenggaraan Perencanaan, pengelolaan dan pengurusan pertanggung jawaban aset dinas sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan ;

(3) Kepala Bidang Pengaturan dan Evaluasi

- A. Kepala Bidang Pengaturan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang pengaturan, pengawasan, pengendalian dan Evaluasi.
- B. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang Pengaturan dan evaluasi menyelenggarakan fungsi :



- a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup bidang
- b. Penyelenggaraan Penyusunan konsep kebijakan dan perencanaan jalan dan jembatan provinsi berdasarkan kebijakan Nasional dengan memperhatikan dan antar kawasan.
- c. Penyelenggaraan Penyusunan, pembuatan konsep rencana strategis (RENSTRA) Laporan Kinerja (LK), dan LKPD Dinas
- d. Penyelenggaraan Penyusunan, pembuatan konsep perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang.
- e. Penyelenggaraan Penyusunan dan pembuatan plafon pelaksanaan anggaran sementara (PPAS), RKA dan DPA dinas serta laporan bulanan, triwulan, dan tahunan.
- f. Penyelenggaraan Penyusunan konsep penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antar ibukota kabupaten, jalan lokal dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer.
- g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- h. Penyelenggaraan Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya, sesuai standar yang ditetapkan



(4) Kepala Bidang Pembinaan Teknik

- A. Kepala Bidang Pembinaan Teknik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pembinaan Teknik jalan dan jembatan, Perizinan, Teknologi Jalan dan Jembatan
- B. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini, Kepala Bidang Pembinaan Teknik , menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyelenggaran Pemberian bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkungan Pembinaan Teknis
 - b. Penyelenggaraan Pemberiaan Bimbingan Teknis, penyuluhan dan pelatihan para penyelenggara jalan provinsi dan Kabupaten/Kota
 - c. Penyelenggaraan Penyusunan pedoman pelaksanaan, perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan jalan dan jembatan ;
 - d. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pengawasan teknik jalan dan jembatan serta pembuatan dokumen lelang ;
 - e. Penyelenggaraan penyusunan izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan jalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan ;
 - f. Penyelenggaraan Pengawasan pemanfaatan jalan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku ;
 - g. Penyelenggaraan Pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan jembatan untuk jalan dan jembatan provinsi ;



- h. Penyelenggaraan pembinaan teknis bagi penyedia jasa pemborongan konstruksi dan jasa pemborongan konsultasi serta Pengembangan teknologi terapan dibidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota ;
- i. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya ;
- j. Penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya.

(5) Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan

- A. Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembangunan dan peningkatan jalan, pembangunan dan penggantian jembatan, administrasi teknik
- B. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan Penyusunan program pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan ;
 - b. Penyelenggaraan Pemantauan, dan evaluasi pengadaan jasa pemborongan konstruksi ;
 - c. Penyelenggaraan Pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan provinsi ;
 - d. Penyelenggaraan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan sesuai ketentuan dan standard yang berlaku ;



- e. Penyelenggaraan Penyusunan konsep tindak lanjut hasil audit ;
- f. Penyelenggaraan Penyusunan konsep jawaban sanggah banding atas pelaksanaan lelang barang dan jasa ;
- g. Penyelenggaraan Penyusunan konsep jawaban atas pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan /peningkatan jalan dan jembatan ;
- h. Penyelenggaraan Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- i. Penyelenggaraan Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas sesuai standard yang ditetapkan ;

(6) Kepala Bidang Pemeliharaan

- A. Kepala Bidang Pemeliharaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan pelaksanaan pemeliharaan jalan, pemeliharaan jembatan dan Administrasi proyek.
- B. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan Penyusunan program pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b. Penyelenggaraan Pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi;
 - c. Penyelenggaraan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai ketentuan dan standard yang berlaku;
 - d. Penyelenggaraan Penyusunan pedoman penataan administrasi pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi;
 - e. Penyelenggaraan Penyusunan konsep tindak lanjut hasil audit;



- f. Penyelenggaraan Penyusunan konsep jawaban sanggah banding atas pelaksanaan lelang barang dan jasa;
- g. Penyelenggaraan Penyusunan konsep atas pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- h. Penyelenggaraan Pembantu pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada kepala daerah;

1.4. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Sumber daya aparatur yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan program kerja dapat kita perhatikan pada tabel daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan tahun anggaran 2016 :

Tabel 1.1 daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan tahun anggaran 2016

NO.	Golongan/Ruang	Jumlah PNS Daerah Provinsi	Keterangan
1	2	3	4
1	IV/A	16	
2	IV/B	16	
3	IV/C	-	
4	IV/D	-	
5	IV/E	-	
JUMLAH		32	
6	III/A	96	
7	III/B	172	
8	III/C	72	
9	III/D	35	
JUMLAH		375	
10	II/A	22	
11	II/B	103	
12	II/C	112	
13	II/D	14	
JUMLAH		251	
14	I/A	3	
15	I/B	4	
16	I/C	9	
17	I/D	3	
JUMLAH		19	
JUMLAH KESELURUHAN		677	



II. Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin						
1. Laki-laki.....		=	480	Orang		
2. Perempuan.....		=	197	Orang		
	JUMLAH	=	677	Orang		
III. Jumlah PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan						
1. Sekolah Dasar (SD)		=	12	Orang		
2. Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP)		=	16	Orang		
3. Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA)		=	316	Orang		
4. Sarjana Muda (SM) / D-3		=	24	Orang		
5. Sarjana (S-1)		=	261	Orang		
6. Pasca Sarjana (S-2)		=	48	Orang		
7. Doktoral (S-3)		=	-	Orang		
	JUMLAH	=	677	Orang		
IV. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan						
1. Fungsional Umum (Staf)		=	589	Orang		
2. Fungsional Pejabat Struktural		=	-	Orang		
3. Eselon II/a		=	-	Orang		
4. Eselon II/b		=	-	Orang		
5. Eselon III/a		=	22	Orang		
6. Eselon III/b		=	-	Orang		
7. Eselon IV		=	66	Orang		
	JUMLAH	=	677	Orang		

Sumber : Kepegawaian Dinas Bina Marga 2016

1.5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik (kb + rb)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanah	431	Tanah	✓	-	428	3
2	Alat Berat	218	Unit	-	✓	128	90
3	Kendaraan Roda 4	90	Tanah	-	✓	53	37
4	Kendaraan Roda 2	137	Unit	-	✓	112	25
5	Sepeda	14	Unit	✓	-	-	14



6	Kereta Sorong	2	Unit	✓	-	-	2
7	Alat Bengkel	132	Unit	-	✓	42	90
8	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	36	Unit	✓	-	-	36
9	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	17	Unit	✓	-	-	17
10	Mesin Ketik Manual Longewagen (18.)	155	Unit	✓	-	-	155
11	Mesin Ketik Listrik Longewagen	1	Unit	✓	-	1	-
12	Mesin Ketik Listrik Portable	2	Unit	-	✓	2	-
13	Mesin Ketik Elektronik	8	Unit	✓	-	1	7
14	Mesin Hitung Manual	97	Unit	✓	-	-	97
15	Mesin Hitung Elektronik	46	Unit	✓	-	-	46
16	Kalkulator	92	Unit	✓	-	-	92
17	Mesin Stensil Manual Folio	3	Unit	✓	-	-	3
18	Mesin Fotocopy (Folio + D. Folio)	3	Unit	-	✓	-	3
19	Mesin Gambar	2	Unit	-	✓	-	2
20	Lemari Besi / Metal	179	Buah	-	✓	105	74
21	Rak Besi	3	Buah	-	✓	1	2
22	Rak Kayu	83	Buah/set	-	✓	5	78
23	Buffet Kayu	1	Buah	-	✓	1	-
24	Buffet Kaca	1	Buah	-	✓	1	-
25	Filling Besi / Metal	294	Buah	-	✓	102	192
26	Filling Kayu	4	Buah	✓	-	-	4
27	Brankas	74	Buah	✓	-	18	56
28	Lemari Kaca	38	Buah	-	✓	21	17
29	Lemari Sorok	1	Buah	-	✓	-	1
30	Lemari Makan	1	Buah	✓	-	-	1
31	Rak Kaca	7	Buah	-	✓	1	6
32	Lemari Arsip	12	Buah	-	✓	11	1
33	Papan Visuil	4	Unit	✓	-	2	2
34	Papan Tulis Elektronik	1	Unit	-	✓	-	1
35	Alat Penghancur Kertas	43	Unit	-	✓	43	-
36	Unit Power Supply	82	Unit	-	✓	67	15



37	Papan Nama Instansi	4	Unit	✓	-	-	4
38	Papan Pengumuman	1	Buah	-	✓	-	1
39	Papan Tulis	11	Buah	✓	-	-	11
40	White Board	30	Buah	-	✓	-	30
41	Peta	1	Buah	-	✓	-	1
42	Alat Pemotong Kertas	1	Unit	-	✓	-	1
43	Hekter Meja	2	Unit	-	✓	-	2
44	Hekter Besar	1	Unit	-	✓	-	1
45	Asbak Duduk	9	Buah	✓	-	-	9
46	Pelobang Kertas	1	Buah	-	✓	-	1
47	Alat Kantor Lainnya	9	Unit	✓	-	-	9
48	Box Arsip	1	Buah	✓	-	1	-
49	Lemari Kayu	224	Buah	✓	-	82	142
50	Meja Besi / Metal	19	Buah	✓	-	-	19
51	Meja Kayu / Rotan	90	Buah	✓	-	-	90
52	Kursi Besi / Metal	301	Buah	✓	-	-	301
53	Kursi Kayu / Rotan / Bambu	450	Buah	✓	-	-	450
54	Zice	51	Set	-	✓	12	39
55	Sofa	14	Set	-	✓	14	-
56	Rak Buku	1	Set	-	✓	1	-
57	Tempat Tidur Busa (Springbed)	13	Unit	-	✓	11	2
58	Tempat Tidur Kayu	9	Unit	-	✓	-	9
59	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	Buah	✓	-	1	-
60	Meja Rapat	172	Buah	-	✓	58	114
61	Meja Tulis	942	Buah	-	✓	387	555
62	Meja Kerja	176	Buah	-	✓	176	-
63	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	✓	-	1	-
64	Meja Makan	1	Buah	✓	-	-	1
65	Meja Tik	25	Buah	✓	-	-	25
66	Meja Tambahan	2	Buah	✓	-	-	2
67	Meja Panjang	31	Buah	✓	-	-	31
68	Meja Bundar	2	Buah	✓	-	-	2
69	Kursi Rapat Pejabat Eselon II	8	Buah	-	✓	8	-
70	Kursi Rapat	221	Buah	-	✓	119	102
71	Kursi Tamu	6	Buah	✓	-	-	6



72	Kursi Tangan	24	Buah	✓	-	-	24
73	Kursi Putar	1,041	Buah	✓	-	537	504
74	Kursi Biasa	138	Buah	✓	-	-	138
75	Kursi Lipat	915	Buah	✓	-	-	915
76	Meja Komputer	48	Buah	-	✓	27	21
77	Kursi Komputer	9	Buah	-	✓	-	9
78	Tenda	8	Buah	✓	-	-	8
79	Meja 1/2 Biro	2	Buah	✓	-	-	2
80	Kaca Bening	1	Buah	✓	-	-	1
81	Lemari Pakaian	1	Buah	✓	-	-	1
82	Meja Toilet	1	Buah	✓	-	-	1
83	Lemari Gantung	1	Buah	✓	-	-	1
84	Meja Gambar	16	Buah	✓	-	12	4
85	Lichdruk Apparat	1	Buah	✓	-	-	1
86	Rak TV	3	Buah	✓	-	-	3
87	Kursi Plastik	24	Buah	✓	-	-	24
88	Jam Mekanis	15	Unit	✓	-	-	15
89	Jam Elektronik	50	Unit	-	✓	-	50
90	Mesin Penghisap Debu	12	Unit	✓	-	-	12
91	Mesin Pemotong Rumput	167	Unit	✓	-	58	109
92	Chainsaw	7	Unit	-	✓	4	3
93	Genset	3	Unit	-	✓	3	-
94	Karpet	6	Unit	-	✓	6	-
95	Gordyn	1	Unit	-	✓	1	-
96	Lemari Es	6	Unit	-	✓	2	4
97	AC Sentral	12	Unit	✓	-	-	12
98	AC Unit	35	Unit	✓	-	8	27
99	AC Split	152	Unit	-	✓	100	52
100	Kipas Angin	209	Unit	✓	-	2	207
101	Teko Listrik	12	Unit	-	✓	-	12
102	Tabung Gas	1	Unit	✓	-	-	1
103	Televisi	29	Unit	-	✓	18	11
104	Cassete Recorder	15	Unit	-	✓	-	15
105	Loudspeaker	24	Unit	-	✓	18	6
106	Soundsystem	5	Unit	-	✓	2	3
107	Wireless	4	Unit	-	✓	-	4
108	Microphone	32	Unit	✓	-	4	28
109	Stabilisator	13	Unit	✓	-	12	1



110	Stand Speaker	4	Unit	-	✓	4	-
111	Stand Mic	4	Unit	-	✓	4	-
112	Power Amply	1	Unit	-	✓	-	1
113	Camera Digital	26	Unit	-	✓	25	1
114	Tustel / Kamera Film	72	Unit	✓	-	-	72
115	Ipad	2	Unit	-	✓	2	-
116	Lambang Garuda Pancasila	2	Buah	✓	-	-	2
117	Gambar Presiden / Wakil Presiden	2	Set	✓	-	-	2
118	Dispenser	21	Unit	-	✓	8	13
119	Mimbar / Podium	1	Buah	-	✓	-	1
120	Handycam	3	Unit	-	✓	1	2
121	Lampu	17	Set	-	✓	-	17
122	Alat Pemadam	171	Unit	✓	-	56	115
123	Speaker Active Komputer	2	Buah	-	✓	2	-
124	PC. Unit	205	Unit	-	✓	118	87
125	Notebook	115	Unit	-	✓	105	10
126	Laptop	15	Unit	-	✓	4	11
127	Proyektor	17	Unit	-	✓	10	7
128	Monitor PC	2	Unit	✓	-	-	2
129	Peralatan Computing Lain-lain	9	Unit	-	✓	7	2
130	Printer	145	Unit	-	✓	85	60
131	Scanner	1	Unit	-	✓	-	1
132	Hardisdisk External	6	Unit	-	✓	4	2
133	DVD External	1	Unit	-	✓	1	-
134	Multy Media Speaker	2	Unit	-	✓	-	2
135	TV Tuner	2	Buah	-	✓	-	2
136	Perlengkapan Komputer	5	Unit	-	✓	5	-
137	Server	1	Unit	-	✓	-	1
138	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	25	Buah	✓	-	25	-
139	Kursi Kerja	556	Buah	-	✓	556	-
140	Alat Studio	4	Unit	-	✓	-	4
141	Screen Proyektor	4	Unit	-	✓	3	1
142	Video Tape Recorder Portable	2	Unit	✓	-	-	2
143	Kaset Video	20	Buah	✓	-	-	20
144	Kamera CCTV	1	Buah	-	✓	1	-
145	GPS	1	Buah	-	✓	1	-
146	Peralatan Studio	6	Unit	✓	-	2	4
147	Rooka Amoniak	1	Unit	✓	-	-	1
148	Rapido	1	Set	✓	-	-	1
149	Alat Penyimpan Data	10	Unit	✓	-	3	7
150	Alat Pengolah Data	20	Unit	✓	-	-	20
151	Theodolit	13	Unit	✓	-	2	11
152	Rol Meter	2	Buah	-	✓	-	2
153	Teropong	5	Buah	-	✓	-	5
154	Meteran	4	Buah	✓	-	2	2
155	Amplifier	7	Unit	-	✓	2	5
156	Telepon (PABX)	6	Unit	✓	-	-	6
157	Pesawat Telepon	15	Unit	-	✓	2	13
158	Handy Talky	15	Unit	✓	-	-	15
159	Intercom	16	Unit	-	✓	7	9
160	Facsmile	7	Unit	-	✓	2	5
161	Aiphone	63	Unit	✓	-	-	63
162	Alat-alat Laboratorium	2,432	Unit	-	✓	126	2,306
163	Gedung dan Bangunan	155	Unit	-	✓	116	39
164	Jaringan Jalan & Jembatan	1,366	Unit	-	-	736	630
165	Buku	2	Buah	-	✓	-	2
166	Barang Bercorak Seni Budaya	55	Buah	-	✓	-	55
167	Aset Tetap Renovasi	14	Buah	-	✓	14	-
168	Aset Tidak Berwujud	6	unit	-	✓	6	-
Jumlah		13,876				4,877	8,999



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif, dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi maka perlu dirumuskan visi Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi dimaksud juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang dirumuskan tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan Daerah yang ditetapkan di dalam Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2013 – 2018.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategik merupakan langkah penting pada waktu mulai berkarya, dan juga pada perjalanan organisasi selanjutnya. Keberlangsungan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan eksternal dan internal, oleh karena itu visi organisasi juga harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut.

Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka visi Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari visi Gubernur Sumatera Utara seperti yang



dirumuskan pada Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2013 - 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang termuat secara utuh dalam wujud:

“Menjadi Provinsi Yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera”

Mengacu pada visi Gubernur Sumatera Utara tersebut dan latar belakang kondisi yang ada pada Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara, situasi dan kecenderungan yang terjadi serta dorongan tekad yang kuat, maka visi Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara dapat dirumuskan sebagai berikut :



Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi :

- 1. Menyelenggarakan pembangunan dan peningkatan ruas jalan Provinsi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan ketersediaan jaringan jalan yang mantap secara bertahap dan berkelanjutan.***
- 2. Menyelenggarakan Preservasi Pemeliharaan Rutin dan Berkala ruas jalan Provinsi guna menjaga kondisi tetap terjaga/mantap.***
- 3. Meningkatkan Perencanaan, Penerapan teknologi dan Pengawasan pelaksanaan pembangunan jalan Provinsi.***
- 4. Menyelenggarakan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan JPTEK, Norma, Standar, Pedoman dan Kerjasama antar daerah, swasta mendukung pelaksanaan kebinamargaan.***
- 5. Menyelenggarakan tata pemerintahan dan sumberdaya yang akuntabel, kompeten, inovatif dengan menerapkan prinsip good governance serta 5 (lima) perintah kharian Gubernur.***



2.2. Tujuan dan Sasaran

2.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara dirumuskan sebagai berikut:

Dalam upaya mewujudkan misi yang telah ditentukan dan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan, maka disusunlah tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi secara berkelanjutan.
- b. Meningkatkan ketersediaan dan kemantapan jaringan jalan Provinsi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan panjang infrastruktur jalan dalam kondisi baik dan mantap yang berwawasan lingkungan.
- d. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, kegiatan nasional, kawasan khusus, daerah tertinggal dan terpencil, kawasan rawan bencana serta mengurangi kesenjangan antar wilayah.
- e. Meningkatkan mutu hasil pekerjaan melalui pengawasan dan pengujian material yang digunakan.
- f. Meningkatkan kerjasama internal maupun external dalam pelaksanaan pembangunan jalan provinsi.



- g. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengelola jaringan jalan melalui bintek dan diklat.

2.2.2 Sasaran

Atas dasar tujuan yang telah dirumuskan tersebut, selanjutnya ditetapkan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun yaitu T.A. 2013 – 2018, sebagai berikut :

1. Meningkatnya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap 95% tahun 2018.
2. Meningkatnya aksesibilitas (kemudahan pencapaian), kenyamanan, keselamatan dan kecepatan tempuh pengguna.
3. Meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan dalam system transportasi yang mendukung peningkatan perekonomian dan social masyarakat melalui pengembangan wilayah, peningkatan kapasitas, dan pembangunan jalan bebas hambatan.
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan jalan dan jembatan Provinsi.
5. Meningkatnya kapasitas dan daya dukung jalan Provinsi.
6. Terwujudnya infrastruktur sosial ekonomi dan pengembangan wilayah.
7. Meningkatnya jumlah pegawai yang ahli dalam pengelolaan/pembangunan jalan.
8. Meningkatnya tata pemerintahan yang bersih dan taat akan hukum.



2.3. Rencana Kinerja

2.3.1 Umum

Rencana kinerja adalah merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara melalui berbagai kegiatan tahunan yang kemudian di buatlah Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2016. Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara dimaksud disusun berdasarkan hasil analisa kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016.

Dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2016 dimaksud untuk mengukur capaian kinerja berdasarkan analisa obyektif terhadap data dan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran (kebijakan, program, dan kegiatan) yang mengakomodir perkembangan / perubahan yang sedang maupun yang akan terjadi , sehingga diharapkan Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara mampu menjadi Dinas yang mampu memberi kinerja yang terbaik untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

2.3.2 Komponen Rencana Kerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2016 berisikan informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai pada periode yang bersangkutan. Untuk mencapai sasaran strategis dimaksud harus mempunyai Indikator kinerja. Dalam menjalankan Indikator kinerja itu harus membuat program/kegiatan agar dapat diukur kinerjanya. Adapun komponen Rencana Kinerja yang nantinya menjadi Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2016 meliputi :

- a. Sasaran pada Perjanjian Kinerja (PK) ini adalah sasaran strategis bagaimana dimuat dalam dokumen Renstra. Selanjutnya telah ditetapkan pada Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Nomor 120/DBM-PE/2832/2014 tanggal 11



Juli 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Tahun 2014 – 2018.

- b. Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang utama yang sudah tercantum pada Rencana Strategi (Renstra) Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Selanjutnya perlu diidentifikasi program-program tersebut untuk mengukur kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui keputusan Gubernur dimaksud.
- c. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran strategis tertentu.

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2016

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2016 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2016. Dinas Bina Marga pada Tahun 2016 mempunyai target yang dapat dilihat pada tabel ringkasan Perjanjian Kinerja 2016:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap	Panjang Jalan yang ditingkatkan (Km)	338,50
		Panjang Jembatan yang ditingkatkan (M)	440,50

Catatan: Perjanjian Kinerja Tahun anggaran 2016 secara rinci dapat dilihat pada lampiran II.

Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016, selanjutnya tertera pada lampiran.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Uraian Akuntabilitas kinerja Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 dapat dijelaskan :

3.1.1 Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Sehubungan dengan hal di atas, pengumpulan data kinerja Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara dilakukan melalui sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data kinerja yang dibutuhkan



dan UPTD yang bertanggung jawab dalam pencatatan. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara sistematis berdasarkan laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan dari unit-unit pelaksana teknis daerah di lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara. Perolehan data kinerja bersumber dari internal Dinas Bina Marga yang secara sistematis didasarkan pada laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan dari unit-unit pelaksana.

Pada akhir tahun data-data tersebut dirangkum dan diolah serta dikomunikasikan kembali kepada unit-unit pelaksana untuk memperoleh klarifikasi dan penyesuaian seperlunya. Data tersebut selanjutnya diolah dan dirangkum untuk disajikan dalam Laporan Kinerja (LK) ini.

3.1.2 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Capaian kinerja Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 mencakup kinerja kegiatan dan kinerja sasaran strategis. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Sedangkan sasaran strategis merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian



Kinerja 2016. Capaian Kinerja merupakan dasar untuk membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) 2013 – 2018.

3.1.3 Hasil Capaian Kinerja

Hasil Capaian Kinerja Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 dapat dilihat bahwa dari 8 sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2013-2018, ada 1 yang menjadi sasaran strategis pada Tahun 2016.

Tahun Anggaran 2016 Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara menjalankan 1 (satu) Sasaran Strategis. Satu Sasaran Strategis dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Sasaran Strategis Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3
1	Meningkatnya panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap	panjang Jalan yang ditingkatkan (Km) panjang Jembatan yang ditingkatkan (M)

Dari Sasaran Strategis dan Indikator kerjanya serta program dan kegiatannya maka capaian kinerja Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel 3.2.



Tabel. 3.2. Capaian Kinerja Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara TA. 2016

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4
1.	Panjang Jalan yang ditingkatkan (Km)	338,50	127,40
	Panjang Jembatan yang ditingkatkan (M)	440,50	375,00

Dari hasil capaian kinerja ini, hasilnya berdampak kepada keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Dinas Bina Marga. Adapun perbandingan keberhasilan Dinas Bina Marga dalam bidang infrastruktur jalan dapat kita lihat pada tabel berikut:

Kondisi		Tahun 2013	%	Tahun 2014	%	Tahun 2015	%	Tahun 2016	%
Mantap	Baik	1.325,23	43,47	1.190,19	39,04	1.236,23	40,55	1.397,83	45,85
	Sedang	796,50	26,13	1.078,56	35,38	1.083,97	35,56	1.066,37	34,98
	Jumlah	2.121,73	69,60	2.268,75	74,42	2.320,20	76,11	2.464,20	80,83
Tidak Mantap	Rusak Ringan	412,08	13,52	259,00	8,50	259,72	8,52	242,12	7,94
	Rusak Berat	514,68	16,88	520,75	17,08	468,58	15,37	342,18	11,22
	Jumlah	926,76	30,40	779,75	25,58	728,30	23,89	584,30	19,17

Untuk melihat keberhasilan Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pencapaian kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2016 terhadap target kinerja yang diperjanjikan dengan Kepala Daerah. Capaian Kinerja pada tabel 3.2 diatas yang merupakan Program Utama Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara dapat diuraikan secara rinci dapat kita lihat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel.3.3. Kegiatan Yang Dilaksanakan Pada Tahun 2016 (*Program Utama*)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
1	2	3	4	
	PROGRAM PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	604.098.381.012		
I	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan	501.725.381.012	127,40	Km
1	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Kuala - Timbang Lawang di Kab. Langkat	19.298.000.000	4,00	Km
2	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Bts. Binjai - Kuala di Kab. Langkat	9.732.000.000	2,00	Km
3	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Deli Tua - Tiga Juhar di Kab. Deli Serdang	12.165.000.000	2,50	Km
4	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Tiga Juhar - Gunung Meriah di Kab. Deli Serdang	14.598.000.000	3,00	Km
5	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Kp. Binjai - Bandar Khalifah di Kab. Serdang Bedagai	8.110.000.000	2,00	Km
6	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Tebing Tinggi (Wts.Serdang Bedagai) - Sipispis di Kab. Serdang Bedagai	19.365.000.000	4,00	Km
7	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Kisaran - Air Joman - Watas Kota Tj. Balai di Kab. Asahan	8.110.000.000	2,00	Km
8	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan T. Balai (Pangkal Tembok) - Pasar I - Bts. Labura di Kab. Asahan	14.192.500.000	3,50	Km
9	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Pasar XI - Silo Bonto - Pematang Sei Waru - Watas Kota Tj. Balai di Kab. Asahan	8.110.000.000	2,00	Km
10	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurs. Pasar I (Perbaungan) - Sei Dua - Psr. Banjar (Wts. Kota Tj. Balai) di Kab. Asahan	6.082.500.000	1,50	Km
11	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sumbul Pegagan - Tiga Baru - Sumbul Jehe di Kab. Dairi	7.300.000.000	2,00	Km
12	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sumbul Pegagan - Parikki - Pangiringan di Kab. Dairi	7.300.000.000	2,00	Km
13	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sukarame - Tanjung Rahu - Panjaratan di Kab. Pakpak Bharat	10.800.000.000	3,00	Km



14	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sp. Jambu (Pakpak Bharat) - Huta Jungak - Sigalingging di Kab Pakpak Bharat	10.800.000.000	3,00	Km
15	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Saribu Dolok - Saran Padang di Kab. Simalungun	7.300.000.000	2,00	Km
16	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Bts. Simalungun - Sondi Raya di Kab. Simalungun	11.900.000.000	3,00	Km
17	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Saran Padang - Bts. Sergei di Kab. Simalungun	9.895.881.012	2,00	Km
18	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Pematang Raya - Tiga Runggu di Kab. Simalungun	14.000.000.000	2,00	Km
19	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Pematang Siantar - Pematang Raya di Kab. Simalungun	4.461.000.000	1,00	Km
20	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Parsoburan - Bts. Labuhan Batu Utara di Kab. Toba Samosir	3.650.000.000	1,00	Km
21	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Parsoburan - Borbor - Pangururan - Janji Maria - Sipahutar di Kab. Toba samosir	3.650.000.000	1,00	Km
22	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Pangaribuan - Garoga di Kab. Tapanuli Utara	5.475.000.000	1,50	Km
23	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Aek Humbang - Bts. Tapanuli Selatan di Kab. Tapanuli Utara	7.300.000.000	2,00	Km
24	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Batu Gajah - Bts. Pakpak Bharat di Kab. Humbang Hasundutan	7.200.000.000	2,00	Km
25	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Tara Bintang - Parllilitan di Kab. Humbang Hasundutan	7.625.000.000	2,00	Km
26	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Dolok Sanggul - Pakkat di Kab. Humbang Hasundutan	10.000.000.000	2,70	Km
27	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Gunung Tua - Km. 168 (Binanga) di Kab. Padang Lawas Utara	9.732.000.000	2,00	Km
28	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Aek Godang - Km. 150 di Kab. Padang Lawas Utara	7.300.000.000	2,00	Km
29	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Hutaimbaru - Sipiongot di Kab. Padang Lawas Utara	7.300.000.000	2,00	Km
30	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan KM. 168 (Binanga) - Sibuhuan di Kab. Padang Lawas	9.732.000.000	2,00	Km
31	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Ujung Batu - Bts. Riau di Kab. Padang Lawas	14.000.000.000	3,00	Km
32	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Km. 150 - Sibuhuan di Kab. Padang Lawas	7.300.000.000	2,00	Km
33	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sp. Ajamu - Simp. Lb. Bilik di Kab. Labuhan Batu	20.165.000.000	5,00	Km



34	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sigambal - Batas Paluta di Kab. Labuhan Batu	12.165.000.000	3,00	Km
35	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sipenggeng - Marancar - Sipiok di Kab. Tapanuli Selatan	9.732.000.000	2,00	Km
36	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sipiok - Sp. Tandosan - Bts. Tapanuli Utara di Kab. Tapanuli Selatan (DAK)	16.200.000.000	4,00	Km
37	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sp. Tandosan - Simangambat - Sipagimbar di Kab. Tapanuli Selatan	10.950.000.000	3,00	Km
38	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sipagimbar - Tolang (Bts. Paluta) di Kab. Tapanuli Selatan	10.950.000.000	3,00	Km
39	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Jembatan Merah - Muarasoma di Kab. Mandailing Natal	20.905.000.000	4,00	Km
40	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Simpang Pulo Padang - Batahan - Bts. Sumbar di Kab. Mandailing Natal	10.800.000.000	3,00	Km
41	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Lahewa - Afulu di Kab. Nias Utara	1.500.000.000	1,00	Km
42	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Tuhemberua - Lotu di Kab. Nias Utara	6.000.000.000	4,00	Km
43	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Afulu - Bts. Nias Barat di Kab. Nias Utara	4.500.000.000	3,00	Km
44	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Siwalawa II - Sirombu di Kab. Nias Barat	4.500.000.000	3,00	Km
45	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Aek Kota Batu - Bts. Tobasa di Kab. Labuhan Batu Utara	16.220.000.000	4,00	Km
46	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Tanjung Pura - Tanjung Selamat di Kab. Langkat	7.300.000.000	2,00	Km
47	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Tj. Selamat - Namu Unggas - Tangkahan di Kab. Langkat	5.300.000.000	1,50	Km
48	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Namu Ukur - Bts. Karo di Kab. Langkat	7.300.000.000	2,00	Km
49	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sorkam Kiri - Sigambo-gambo - Barus di Kab. Tapanuli Tengah	13.455.500.000	3,70	Km
50	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Muara Soma - Simp. Gambir di Kab. Mandailing Natal	7.299.000.000	1,50	Km
51	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sei Buaya - Bts. Simalungun di Kab. Deli Serdang	4.700.000.000	1,00	Km
52	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan P. Rakyat - Bandar Pulau - Bts. Tobasa di Kab. Asahan	8.000.000.000	2,00	Km
II	Program Peningkatan/Pembangunan Jembatan	102.373.000.000	375,00	m
1	Pembangunan Jembatan Provinsi Titi Gertak pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Jalan Marelan (Sp. Kantor - Bts. Deli Serdang) di Kota Medan	4.500.000.000	14,00	m
2	Pembangunan Jembatan Provinsi Sei Kera 1 pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Deli Tua - Tiga Juhar di Kab. Deli Serdang	1.925.000.000	7,00	m
3	Pembangunan Jembatan Provinsi Lau Batih pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Tiga Juhar - Gunung Meriah di Kab. Deli Serdang	1.925.000.000	7,00	m



4	Penggantian Jembatan Provinsi Sei Galang 3 pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Tanah Abang - Bts. Sergei di Kab. Deli Serdang	2.950.000.000	12,00	m
5	Penggantian Jembatan Sei Titi Bendang-2 pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Kisaran - Air Joman - Wts. Tj. Balai di Kab. Asahan	1.925.000.000	7,00	m
6	Pembangunan Jembatan Sei Pasir Kecil pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Gertak Serong - Sarang Elang - Sei Sembilang - Watas Labura di Kab. Asahan	3.575.000.000	17,00	m
7	Penggantian Jembatan Provinsi Lae Marsaban pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Sumbul Pegagan - Parikki - Pangiringan di Kab. Dairi	2.200.000.000	8,00	m
8	Penggantian Jembatan Aek Huwalu II pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Parsoburan - Borbor - Rianiate di Kab. Toba Samosir	8.250.000.000	30,00	m
9	Penggantian Jembatan Aek Binanga Selapat pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Sp. Silangit - Sitanggor - Bts. Tobasa (STA. 119+500) di Kab. Tapanuli Utara	4.400.000.000	16,00	m
10	Penggantian Jembatan Aek Tangkapan pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Aek Humbang - Bts. Tapsel (STA. 167+99) di Kab. Tapanuli Utara	2.200.000.000	8,00	m
11	Pembangunan Jembatan Sitolu-tolu pada ruas jalan Provinsi Jurusan Porsea - Bts. Asahan di Kab. Toba Samosir	1.925.000.000	7,00	m
12	Pembangunan Jembatan Sitahuis pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Pakkat - Tara Bintang di Kab. Humbang Hasundutan	3.350.000.000	14,00	m
13	Pembangunan Jembatan Aek Sibulung Bira pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Gunung Tua - Binanga di Kab. Padang Lawas Utara	6.900.000.000	24,00	m
14	Pembangunan Jembatan Sei Guru Bokar pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Sp. Ajamu - Sp. Lb. Bilik di Kab. Labuhan Batu	1.650.000.000	6,00	m
15	Pembangunan Jembatan Aek Simpang Banyak pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Muara Pungkut - Sp. Banyak di Kab. Mandailing Natal	2.500.000.000	13,00	m
16	Pembangunan Jembatan Aek Pasar Karom pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Jembatan Merah – Muarasoma di Kab. Mandailing Natal	1.925.000.000	7,00	m
17	Pembangunan Jembatan Aek Milas pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Jembatan Merah – Muarasoma di Kab. Mandailing Natal	3.300.000.000	12,00	m
18	Pembangunan Jembatan Idano Ge'e Km. 58+900 pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Tuhembuasi - Mandrehe di Kab. Nias Barat	3.150.000.000	12,00	m



19	Pembangunan Jembatan Idano Mazinali Km. 61+300 pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Tuhembuasi - Mandrehe di Kab. Nias Barat	2.150.000.000	8,00	m
20	Pembangunan Jembatan Aek Bandar Selamat pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Aek Kota Batu - Bts. Tobasa di Kab. Labuhan Batu Utara	3.300.000.000	12,00	m
21	Pembangunan Jembatan Aek Garotak 3 pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Aek Kota Batu - Bts. Tobasa di Kab. Labuhan Batu Utara	2.200.000.000	8,00	m
22	Pembangunan Jembatan Aek Salak pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Aek Kota Batu - Bts. Tobasa di Kab. Labuhan Batu Utara	3.300.000.000	12,00	m
23	Pembangunan Jembatan Aek Aporaron pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Aek Kota Batu - Bts. Tobasa di Kab. Labuhan Batu Utara	3.300.000.000	12,00	m
24	Pembangunan Jembatan Idano Fadoro Sohoya pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Afulu - Bts. Nias Barat Km. 114+050 di Kab. Nias Utara	2.150.000.000	8,00	m
25	Pembangunan Jembatan Aek Saba Tolang pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Km. 168 - Sibuhuan di Kab. Padang Lawas	4.648.000.000	15,00	m
26	Pembangunan Jembatan Aek Dolok pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Km. 168 - Sibuhuan di Kab. Padang Lawas	5.850.000.000	18,00	m
27	Pembangunan Jembatan Aek Buaton pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Km. 168 - Sibuhuan di Kab. Padang Lawas	4.600.000.000	16,00	m
28	Pembangunan Jembatan Idano Forua pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Hilimbuasi - Mendrehe di Kab. Nias Barat	2.200.000.000	7,00	m
29	Pembangunan Jembatan Idano Bawa Gafasi pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Hilimbuasi - Mendrehe di Kab. Nias Barat	2.500.000.000	8,00	m
30	Pembangunan Jembatan Idano Garongo pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Hilimbuasi - Mendrehe di Kab. Nias Barat	2.500.000.000	8,00	m
31	Pembangunan Jembatan Aek Sigorbus pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Sipenggeng - Marancar - Sipirok di Kab. Tapanuli Selatan	2.200.000.000	8,00	m
32	Pembangunan Jembatan Aek Nagaga pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Pulau Rakyat - Bts. Tobasa di Kab. Asahan	1.925.000.000	7,00	m
33	Pembangunan Jembatan/Box Culvert Sei Pasir Kecil 1 pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Gertak Serong - Sarang Elang - Sei Sembilang - Watas Labura di Kab. Asahan	1.000.000.000	7,00	m



Pada tahun anggaran 2016 dari keseluruhan Program Utama ada 5 paket kegiatan yang sisa pembayarannya diluncurkan dan akan ditampung pada Tahun Anggaran 2017, 2 paket kegiatan yang batal, 5 paket pelelangan gagal serta ada 3 paket kegiatan yang putus kontrak. Adapun kegiatan tersebut, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

- ❖ 5 (lima) paket kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang sisa pembayarannya diluncurkan dan akan ditampung pada Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut (tabel 3.4.) :

Tabel 3.4.

No	Program/Kegiatan
PROGRAM PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	
1	Pembangunan Jembatan Provinsi Sei Kera 1 pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Deli Tua - Tiga Juhar di Kab. Deli Serdang Sep. 7 m
2	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan T. Balai (Pangkal Tembok) - Pasar I - Bts. Labura di Kab. Asahan Sep. 3,50 Km
3	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Pasar XI - Silo Bonto - Pematang Sei Waru - Watas Kota Tj. Balai di Kab. Asahan Sep. 2 Km
4	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurs. Pasar I (Perbaungan) - Sei Dua - Psr. Banjar (Wts. Kota Tj. Balai) di Kab. Asahan Sep. 1,50 Km
5	Pembangunan Jembatan Idano Fadoro Sohoya pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Afulu - Bts. Nias Barat Km. 114+050 di Kab. Nias Utara Sep. 8 m

- ❖ 2 (dua) paket kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang batal sebagai berikut (tabel 3.5.) :

Tabel 3.5.

No	Program/Kegiatan
PROGRAM PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	
1	Penggantian Jembatan Sitolu-tolu pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Porsea - Bts. Asahan di Kab. Toba Samosir Sep. 7 m
2	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sei Buaya - Bts. Simalungun di Kab. Deli Serdang Sep. 1 Km



- ❖ 5 (lima) paket kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang pelelangan gagal sebagai berikut (tabel 3.6.) :

Tabel 3.6.

No	Program/Kegiatan
PROGRAM PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	
1	Pembangunan Jembatan Provinsi Titi Gertak pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Jalan Marelan (Sp. Kantor - Bts. Deli Serdang) di Kota Medan Sep. 14 m
2	Penggantian Jembatan Sei Titi Bendang-2 pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Kisaran - Air Joman - Wts. Tj. Balai di Kab. Asahan Sep. 7 m
3	Penggantian Jembatan Sei Pasir Kecil pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Gertak Serong - Sarang Elang - Sei Sembilang - Watas Labura di Kab. Asahan Sep. 17 m
4	Pembangunan Jembatan Aek Pasar Karom pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Jembatan Merah - Muarasoma di Kab. Mandailing Natal Sep. 7 m
5	Pembangunan Jembatan Aek Nagaga pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Pulau Rakyat - Bts. Tobasa di Kab. Asahan Sep. 7 m

- ❖ 3 (tiga) paket kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang putus kontrak sebagai berikut (tabel 3.7.) :

Tabel 3.7.

No	Program/Kegiatan
PROGRAM PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	
1	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Deli Tua - Tiga Juhar di Kab. Deli Serdang Sep. 2.50 Km
2	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Batu Gajah - Bts. Pakpak Bharat di Kab. Humbang Hasundutan Sep. 2 Km
3	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Tara Bintang - Parlilitan di Kab. Humbang Hasundutan Sep 2 Km



Dengan adanya 5 paket kegiatan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan provinsi yang sisa pembayarannya diluncurkan, 2 paket kegiatan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan provinsi yang batal, 5 paket kegiatan pembangunan/peningkatan jembatan provinsi yang pelelangan gagal serta 3 paket kegiatan pembangunan/peningkatan jalan provinsi, maka target pencapaian kinerja Program Utama berkurang dari sebagaimana mestinya yang tertera pada Perjanjian Kinerja (PK) TA.2016. Adapun Realisasi Pencapaian Perjanjian Kinerja TA. 2016 dapat kita lihat sebagai berikut (tabel 3.8.) :



Tabel. 3.8. Realisasi Pencapaian Perjanjian Kinerja TA. 2016

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi		Fisik (%)	Ket	
			Kinerja	Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	
	PROGRAM PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	504.726.369.053			465.656.638.313	98,75 %	Keu 92,26 %
I	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan	428.087.078.625	127,40	Km	391.098.926.832		
1	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Kuala - Timbang Lawang di Kab. Langkat	17.551.815.800	4,00	Km	17.528.565.800		
2	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Bts. Binjai - Kuala di Kab. Langkat	8.875.296.100	2,00	Km	8.856.246.100		
3	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Deli Tua - Tiga Juhar di Kab. Deli Serdang	11.337.859.592	2,50	Km	2.411.778.650		Putus Kontrak
4	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Tiga Juhar - Gunung Meriah di Kab. Deli Serdang	12.835.419.578	3,00	Km	12.790.716.401		
5	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Kp. Binjai - Bandar Khalifah di Kab. Serdang Bedagai	6.579.002.031	2,00	Km	6.564.187.465		
6	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Tebing Tinggi (Wts.Serdang Bedagai) - Sipispis di Kab. Serdang Bedagai	14.439.435.417	4,00	Km	14.394.520.453		
7	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Kisaran - Air Joman - Watas Kota Tj. Balai di Kab. Asahan	7.245.649.971	2,00	Km	7.216.155.626		
8	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan T. Balai (Pangkal Tembok) - Pasar I - Bts. Labura di Kab. Asahan	11.951.034.913	3,50	Km	5.223.992.127		Sisa Pembayaran Luncuran akan ditampung pada TA. 2017
9	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Pasar XI - Silo Bonto - Pematang Sei Waru - Watas Kota Tj. Balai di Kab. Asahan	6.763.998.381	2,00	Km	1.421.243.676		Sisa Pembayaran Luncuran akan ditampung pada TA. 2017
10	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurs. Pasar I (Perbaungan) - Sei Dua - Psr. Banjar (Wts. Kota Tj. Balai) di Kab. Asahan	5.059.597.114	1,50	Km	1.120.979.422		Sisa Pembayaran Luncuran akan ditampung pada TA. 2017
11	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sumbul Pegagan - Tiga Baru - Sumbul Jehe di Kab. Dairi	6.307.284.999	2,00	Km	6.301.584.999		
12	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sumbul Pegagan - Parikki - Pangiringan di Kab. Dairi	6.704.993.503	2,00	Km	6.697.483.503		



13	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sukarame - Tanjung Rahu - Panjaratan di Kab. Pakpak Bharat	8.973.294.289	3,00	Km	8.966.154.289		
14	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sp. Jambu (Pakpak Bharat) - Huta Jungak - Sigalingging di Kab Pakpak Bharat	8.495.381.272	3,00	Km	8.488.391.272		
15	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Saribu Dolok - Saran Padang di Kab. Simalungun	7.114.620.816	2,00	Km	7.110.990.816		
16	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Bts. Simalungun - Sondi Raya di Kab. Simalungun	9.897.817.140	3,00	Km	9.878.586.140		
17	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Saran Padang - Bts. Sergei di Kab. Simalungun	9.128.574.937	2,00	Km	9.124.754.937		
18	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Pematang Raya - Tiga Runggu di Kab. Simalungun	13.259.172.149	2,00	Km	13.255.382.149		
19	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Pematang Siantar - Pematang Raya di Kab. Simalungun	4.252.444.493	1,00	Km	4.247.974.493		
20	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Parsoburan - Bts. Labuhan Batu Utara di Kab. Toba Samosir	3.352.373.000	1,00	Km	3.352.318.000		
21	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Parsoburan - Borbor - Pangururan - Janji Maria - Sipahutar di Kab. Toba samosir	2.899.077.000	1,00	Km	2.899.027.000		
22	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Pangaribuan - Garoga di Kab. Tapanuli Utara	5.120.770.000	1,50	Km	5.023.559.500		
23	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Aek Humbang - Bts. Tapanuli Selatan di Kab. Tapanuli Utara	6.493.079.000	2,00	Km	6.492.907.500		
24	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Batu Gajah - Bts. Pakpak Bharat di Kab. Humbang Hasundutan	6.503.632.225	2,00	Km	1.396.339.755		Putus Kontrak
25	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Tara Bintang - Parlilitan di Kab. Humbang Hasundutan	7.093.788.701	2,00	Km	5.357.961.815		Putus Kontrak
26	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Dolok Sanggul - Pakkat di Kab. Humbang Hasundutan	8.745.620.032	2,70	Km	8.740.511.407		
27	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Gunung Tua - Km. 168 (Binanga) di Kab. Padang Lawas Utara	8.909.215.000	2,00	Km	8.906.165.000		



28	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Aek Godang - Km. 150 di Kab. Padang Lawas Utara	6.419.370.000	2,00	Km	6.416.320.000		
29	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Hutaimbaru - Sipiongot di Kab. Padang Lawas Utara	6.456.853.000	2,00	Km	6.453.803.000		
30	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan KM. 168 (Binanga) - Sibuhuan di Kab. Padang Lawas	8.524.863.000	2,00	Km	8.520.033.000		
31	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Ujung Batu - Bts. Riau di Kab. Padang Lawas	11.157.222.000	3,00	Km	11.093.342.000		
32	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Km. 150 - Sibuhuan di Kab. Padang Lawas	5.976.060.000	2,00	Km	5.976.060.000		
33	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sp. Ajamu - Simp. Lb. Bilik di Kab. Labuhan Batu	17.005.018.140	5,00	Km	16.984.612.495		
34	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sigambal - Batas Paluta di Kab. Labuhan Batu	11.295.627.795	3,00	Km	11.278.688.659		
35	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sipenggeng - Marancar - Sipirok di Kab. Tapanuli Selatan	6.819.660.000	2,00	Km	6.819.505.000		
36	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sipirok - Sp. Tandosan - Bts. Tapanuli Utara di Kab. Tapanuli Selatan (DAK)	15.418.589.000	4,00	Km	12.502.967.000		
37	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sp. Tandosan - Simangambat - Sipagimbar di Kab. Tapanuli Selatan	8.996.910.000	3,00	Km	8.984.971.000		
38	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sipagimbar - Tolang (Bts. Paluta) di Kab. Tapanuli Selatan	7.004.791.000	3,00	Km	7.004.767.900		
39	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Jembatan Merah - Muarasoma di Kab. Mandailing Natal	18.079.718.000	4,00	Km	18.042.461.800		
40	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Simpang Pulo Padang - Batahan - Bts. Sumbang di Kab. Mandailing Natal	10.152.359.000	3,00	Km	10.129.863.100		
41	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Lahewa - Afulu di Kab. Nias Utara	1.465.730.223	1,00	Km	1.458.683.648		
42	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Tuhemberua - Lotu di Kab. Nias Utara	5.503.181.001	4,00	Km	5.474.082.001		
43	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Afulu - Bts. Nias Barat di Kab. Nias Utara	4.379.387.536	3,00	Km	4.340.514.536		
44	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Siwalawa II - Sirombu di Kab. Nias Barat	4.174.571.949	3,00	Km	4.142.759.749		



45	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Aek Kota Batu - Bts. Tobasa di Kab. Labuhan Batu Utara	12.477.651.658	4,00	Km	12.450.637.775		
46	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Tanjung Pura - Tanjung Selamat di Kab. Langkat	7.071.229.100	2,00	Km	6.612.957.700		
47	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Tj. Selamat - Namu Unggas - Tangkahan di Kab. Langkat	5.067.955.700	1,50	Km	5.047.855.700		
48	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Namu Ukur - Bts. Karo di Kab. Langkat	5.858.764.200	2,00	Km	5.840.014.200		
49	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sorkam Kiri - Sigambo-gambo - Barus di Kab. Tapanuli Tengah	10.818.722.500	3,70	Km	10.805.544.350		
50	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Muara Soma - Simp. Gambir di Kab. Mandailing Natal	5.742.337.000	1,50	Km	4.795.002.249		
51	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sei Buaya - Bts. Simalungun di Kab. Deli Serdang	56.420.000	1,00	Km	-		Batal (tidak adanya lokasi pekerjaan)
52	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan P. Rakyat - Bandar Pulau - Bts. Tobasa di Kab. Asahan	6.273.839.370	2,00	Km	6.155.001.675		
II	Program Peningkatan/Pembangunan Jembatan	76.639.290.428	375,00	m	74.557.711.481		
1	Pembangunan Jembatan Provinsi Titi Gertak pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Jalan Marelan (Sp. Kantor - Bts. Deli Serdang) di Kota Medan	90.000.000	14,00	m	11.060.250		Lelang Gagal
2	Pembangunan Jembatan Provinsi Sei Kera 1 pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Deli Tua - Tiga Juhar di Kab. Deli Serdang	1.631.533.720	7,00	m	1.119.425.014		Sisa Pembayaran Luncauran akan ditampung pada TA. 2017
3	Pembangunan Jembatan Provinsi Lau Batih pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Tiga Juhar - Gunung Meriah di Kab. Deli Serdang	1.711.098.727	7,00	m	1.707.611.027		
4	Penggantian Jembatan Provinsi Sei Galang 3 pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Tanah Abang - Bts. Sergei di Kab. Deli Serdang	2.751.017.180	12,00	m	2.747.979.300		
5	Penggantian Jembatan Sei Titi Bendang-2 pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Kisaran - Air Joman - Wts. Tj. Balai di Kab. Asahan	88.157.000	7,00	m	26.949.560		Lelang Gagal
6	Pembangunan Jembatan Sei Pasir Kecil pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Gertak Serong - Sarang Elang - Sei Sembilang - Watas Labura di Kab. Asahan	89.000.000	17,00	m	27.482.932		Lelang Gagal
7	Penggantian Jembatan Provinsi Lae Marsaban pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Sumbul Pegagan - Parikki - Pangiringan di Kab. Dairi	1.858.758.586	8,00	m	1.855.098.586		
8	Penggantian Jembatan Aek Huwalu II pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Parsoburan - Borbor - Rianiate di Kab. Toba Samosir	6.309.065.000	30,00	m	5.891.874.000		
9	Penggantian Jembatan Aek Binanga Selapat pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Sp. Silangit - Sitanggor - Bts. Tobasa (STA. 119+500) di Kab. Tapanuli Utara	3.362.045.000	16,00	m	3.147.421.000		
10	Penggantian Jembatan Aek Tangkapan pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Aek Humbang - Bts. Tapsel (STA. 167+99) di Kab. Tapanuli Utara	2.008.468.000	8,00	m	2.008.428.000		



11	Pembangunan Jembatan Sitolu-tolu pada ruas jalan Provinsi Jurusan Porsea - Bts. Asahan di Kab. Toba Samosir	35.900.000	7,00	m	-	Batal dikarenakan pembangunan jembatan telah ditangani oleh PT. Inalum
12	Pembangunan Jembatan Sitahuis pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Pakkat - Tara Bintang di Kab. Humbang Hasundutan	3.184.208.937	14,00	m	3.157.553.437	
13	Pembangunan Jembatan Aek Sibulung Bira pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Gunung Tua - Binanga di Kab. Padang Lawas Utara	6.595.000.000	24,00	m	6.591.500.000	
14	Pembangunan Jembatan Sei Guru Bokar pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Sp. Ajamu - Sp. Lb. Bilik di Kab. Labuhan Batu	1.339.771.414	6,00	m	1.331.868.975	
15	Pembangunan Jembatan Aek Simpang Banyak pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Muara Pungkut - Sp. Banyak di Kab. Mandailing Natal	2.208.005.800	13,00	m	2.194.017.800	
16	Pembangunan Jembatan Aek Pasar Karom pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Jembatan Merah – Muarasoma di Kab. Mandailing Natal	55.000.000	7,00	m	1.299.800	Lelang Gagal
17	Pembangunan Jembatan Aek Milas pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Jembatan Merah – Muarasoma di Kab. Mandailing Natal	2.467.128.000	12,00	m	2.447.941.400	
18	Pembangunan Jembatan Idano Ge'e Km. 58+900 pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Tuhembuasi - Mandrehe di Kab. Nias Barat	2.952.258.457	12,00	m	2.932.403.357	
19	Pembangunan Jembatan Idano Mazinali Km. 61+300 pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Tuhembuasi - Mandrehe di Kab. Nias Barat	2.072.046.010	8,00	m	2.059.042.010	
20	Pembangunan Jembatan Aek Bandar Selamat pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Aek Kota Batu - Bts. Tobasa di Kab. Labuhan Batu Utara	2.806.925.308	12,00	m	2.794.137.725	
21	Pembangunan Jembatan Aek Garotak 3 pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Aek Kota Batu - Bts. Tobasa di Kab. Labuhan Batu Utara	1.935.491.494	8,00	m	1.925.652.694	
22	Pembangunan Jembatan Aek Salak pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Aek Kota Batu - Bts. Tobasa di Kab. Labuhan Batu Utara	2.967.422.856	12,00	m	2.954.419.706	
23	Pembangunan Jembatan Aek Aporaron pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Aek Kota Batu - Bts. Tobasa di Kab. Labuhan Batu Utara	2.982.742.132	12,00	m	2.968.879.535	



24	Pembangunan Jembatan Idano Fadoro Sohoya pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Afulu - Bts. Nias Barat Km. 114+050 di Kab. Nias Utara	1.915.524.632	8,00	m	1.577.569.798	Sisa Pembayaran Luncuran akan ditampung pada TA. 2017
25	Pembangunan Jembatan Aek Saba Tolang pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Km. 168 - Sibuhuan di Kab. Padang Lawas	3.817.736.000	15,00	m	3.817.602.000	
26	Pembangunan Jembatan Aek Dolok pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Km. 168 - Sibuhuan di Kab. Padang Lawas	5.486.550.000	18,00	m	5.483.510.000	
27	Pembangunan Jembatan Aek Buatou pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Km. 168 - Sibuhuan di Kab. Padang Lawas	4.315.277.000	16,00	m	4.314.243.000	
28	Pembangunan Jembatan Idano Forua pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Hilimbuasi - Mendrehe di Kab. Nias Barat	1.876.118.330	7,00	m	1.852.374.330	
29	Pembangunan Jembatan Idano Bawa Gafasi pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Hilimbuasi - Mendrehe di Kab. Nias Barat	2.402.677.244	8,00	m	2.384.454.244	
30	Pembangunan Jembatan Idano Garongo pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Hilimbuasi - Mendrehe di Kab. Nias Barat	2.421.297.193	8,00	m	2.409.803.193	
31	Pembangunan Jembatan Aek Sigorbus pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Sipenggeng - Marancar - Sipirok di Kab. Tapanuli Selatan	1.961.151.000	8,00	m	1.961.120.400	
32	Pembangunan Jembatan Aek Nagaga pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Pulau Rakyat - Bts. Tobasa di Kab. Asahan	88.157.000	7,00	m	6.350.000	Lelang Gagal
33	Pembangunan Jembatan/Box Culvert Sei Pasir Kecil 1 pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Gertak Serong - Sarang Elang - Sei Sembilang - Watas Labura di Kab. Asahan	853.758.408	7,00	m	848.638.408	

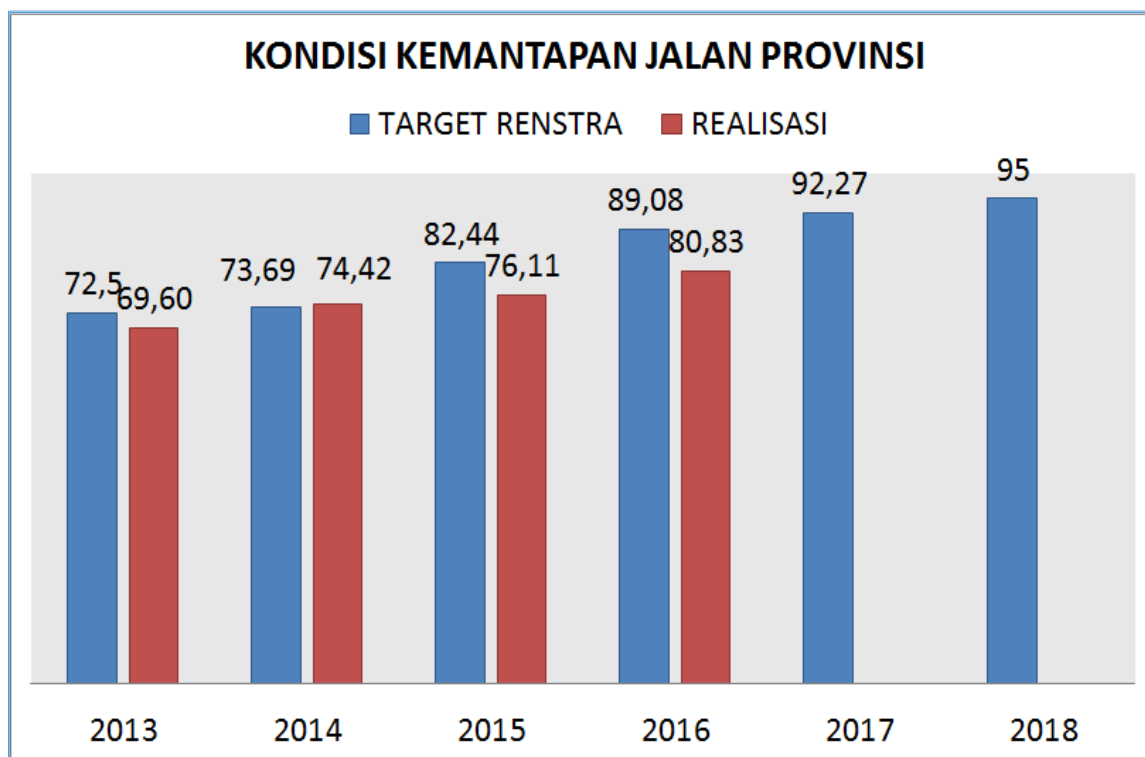
Realisasi dari Kegiatan Program Utama Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi fisik keseluruhan Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan sebesar 98,75 % dan realisasi Keuangan sebesar 92,26 %.



3.2. PERBANDINGAN HASIL CAPAIAN KINERJA TERHADAP TAHUN – TAHUN SEBELUMNYA

Hasil capaian kinerja Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan target capaian Kinerja RPJMD dan Renstra Dinas Bina Marga Tahun 2013 – 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Kondisi		Tahun 2013	%	Tahun 2014	%	Tahun 2015	%	Tahun 2016	%
Mantap	Baik	1.325,23	43,47	1.190,19	39,04	1.236,23	40,55	1.397,83	45,85
	Sedang	796,50	26,13	1.078,56	35,38	1.083,97	35,56	1.066,37	34,98
	Jumlah	2.121,73	69,60	2.268,75	74,42	2.320,20	76,11	2.464,20	80,83
Tidak Mantap	Rusak Ringan	412,08	13,52	259,00	8,50	259,72	8,52	242,12	7,94
	Rusak Berat	514,68	16,88	520,75	17,08	468,58	15,37	342,18	11,22
	Jumlah	926,76	30,40	779,75	25,58	728,30	23,89	584,30	19,17





Dari tabel maupun grafik tersebut dapat kita lihat adanya Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi dari tahun 2013 sepanjang 2121,73 km menjadi 2268,75 km pada tahun 2014, di tahun 2015 menjadi 2320,20 Km dan menjadi 2464,20 Km pada realisasi tahun 2016.

Sementara target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sepanjang 338,50 Km untuk Pembangunan / Peningkatan Jalan dan 440,50 M untuk Pembangunan / Penggantian Jembatan, hanya terealisasi 127,40 Km Pembangunan / Peningkatan Jalan dan 375 M Pembangunan / Penggantian Jembatan serta target Kemantapan Jalan Provinsi pada tahun 2016 sebesar 89,08 % sementara realisasi pencapaian pada tahun 2016 sebesar 80,83 %.

Dari kondisi pencapaian target yang tidak tercapai sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra Dinas Bina Marga disebabkan oleh :

1. Adanya 5 paket kegiatan yang pelaksanaannya melampaui tahun anggaran dengan masa denda dan pembayarannya dilakukan pada PAPBD TA. 2017 (*luncuran*)
2. Adanya pemutusan kontrak sebanyak 3 paket kegiatan dikarenakan ketidaksiapan pihak pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kinerja.
3. Adanya 2 paket kegiatan yang batal dan 5 paket kegiatan yang pelelangan gagal.
4. Keterbatasan APBD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka penanganan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi sesuai dengan kebutuhan yang tertuang dalam RPJMD maupun Renstra untuk setiap tahunnya.



3.3. EVALUASIDAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja difokuskan terhadap capaian masing-masing sasaran strategis Tahun 2016 yang diuraikan dibawah ini.



Untuk menunjang keberhasilan sasaran meningkatkan kondisi Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap dengan didukung indikator panjang Jalan yang ditingkatkan dan panjang Jembatan yang ditingkatkan sehingga tercapai pelayanan lalu lintas yang nyaman.

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Panjang Jalan yang ditingkatkan (Km).	338,50	127,40
Panjang Jembatan yang ditingkatkan (M).	440,50	375,00



Faktor-faktor Kunci Keberhasilan (SWOT)

A), Analisa Lingkungan

(1) Analisis Lingkungan Internal

Dasar Arah, dan Penekanan terhadap Analisis Lingkungan Internal untuk mendapatkan faktor-faktor dominan yang dapat menjadi kunci keberhasilan program dan pencapaian sasaran, tujuan, visi dan misi ditinjau dari aspek sebagai berikut :

1. Kemampuan Kelembagaan/Instansi
2. Kondisi Sumber Daya Manusia
3. Kondisi Data, Studi dan Informasi
4. Kemampuan Dana
5. Kemampuan Teknologi Pelayanan
6. Organisasi Pelayanan
7. Etos Kerja

Dari Aspek tersebut diperoleh faktor-faktor yang dominan yang dapat menjadi kunci keberhasilan sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strenght)

Merupakan situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan sebagai pendorong tercapainya visi dan misi yaitu :

- Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM)
- Adanya Potensi Sumber Daya Alam(SDA) seperti aspal
- Adanya Dukungan Dana APBD, APBN dan LOAN
- Adanya Struktur dan Tata Kerja Organisasi



b. Kelemahan (Weakness)

Merupakan situasi ketidakmampuan internal yang dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian visi dan misi.

- Kompetensi SDM yang ada masih rendah
- Infrastruktur Jalan dan jembatan yang tersedia terbatas dan banyak rusak
- Peraturan perundangan sebagai pendukung belum lengkap
- Data Sumber Daya Alam masih terbatas

(2). Analisis Lingkungan Eksternal

Dasar Arahan, dan Penekanan terhadap Analisis Lingkungan Eksternal untuk mendapatkan faktor-faktor dominan yang menjadi keberhasilan program dan pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi ditinjau dari aspek sebagai berikut :

- a. Kesepakatan Global
- b. Agenda Pemerintah
- c. RPJM/RPJMD
- d. Permasalahan SDA
- e. Kebijakan Pemerintah, Departemen terkait, Pemerintah Provinsi
- f. Pendekatan Pembangunan
- g. Pelayanan Minimal

Dari aspek tersebut diperoleh faktor-faktor yang dominan yang dapat menjadi kunci keberhasilan sebagai berikut :

- a. Peluang (Opportunity)



Merupakan situasi dan faktor-faktor luar yang dapat menjadi pendorong atas pemicu terlampirnya pencapaian visi dan misi.

- Adanya Program tertuang dalam RPJM
- Adanya peningkatan kebutuhan pemakai/pengguna jalan/jembatan
- Adanya teknologi dalam bidang jalan dan jembatan
- Adanya pergeseran nilai jalan dan jembatan dari nilai sosial menjadi nilai ekonomis.

b. Ancaman/Kendala (Threats)

Merupakan faktor-faktor luar yang dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian visi dan misi.

- Kerusakan Lingkungan jalan dan jembatan meningkat
- Ketersediaan jalan dan jembatan sepanjang tahun kurang
- Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya jalan dan jembatan
- Adanya ancaman daya rusak jalan dan jembatan (Banjir, Kekeringan, longsor, dan lain-lain)
- Terbatasnya biaya untuk keperluan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan (operasi dan pemeliharaan) jalan dan jembatan
- Sulitnya pelaksanaan pembebasan tanah

(3). Strategi Untuk Mendapatkan Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan (Critical Succes Factors)



Untuk mendapatkan faktor-faktor kunci keberhasilan dari faktor analisis :
kekuatan-peluang, kelemahan-peluang, kekuatan-ancaman dan kelenahan-
ancaman melalui Perumusan Asumsi Strategi (ASTRA) yang diuraikan
dalam Tabel 2 Analisis SWOT dibawah ini

Tabel 3.1 Analisis SWOT

INTERNAL EXTERNAL	KEKUATAN (S) 1. Tersedianya Sumber Daya Manusia. 2. Adanya Potensi Sumber Daya Alam. 3. Adanya Dukungan Dana APBN dan LOAN 4. Adanya Struktur dan Tata Kerja Organisasi.	KELEMAHAN (w) 1. Kompetensi SDM yang ada masih rendah 2. Infrastruktur Jalan dan jembatan yang tersedia terbatas dan banyak rusak 3. Peraturan perundangan sebagai pendukung belum lengkap. 4. Data Sumber Daya Air masih terbatas
PELUANG (O) 1. Adanya Program tertuang dalam RPJM 2. Adanya peningkatan kebutuhan pemakai/pengguna jalan dan jembatan 3. Adanya tehnologi dalam bidang jalan dan jembatan 4. Adanya pegeseran nilai jalan dan jembatan dari nilai sosial menja di nilai ekonomis	S+O Pakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang. SO-1 : :Memberdayakan SDM untuk aktif dalam pengelolaan jalan dan jembatan So-2 : Memanfaatkan potensi SDA melalui tehnologi untuk mendapatkan benefit SO-3 : Melaksanakan pengawasan perijinan/pemanfaatan sumber daya aalam	W+O Tanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang WO-1 Mengadakan Pelatihan SDM dengan pemanfaatan Tehnologi SDA WO-2 menyusun Perda dan Standard Pengelolaan melalui kegiatan dalam RPJM WO-2 : Membangun memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur melalui program RPJM WO-4 Mengelola pengembangan Data SDA melalui program RPJM
TANTANGAN (T) 1. Kerusakan Lingkungan jalan dan jembatan meningkat 2. Ketersediaan jalan dan jembatan sepanjang tahun	S+T :Gunakan kekuatan untuk menjawab tantangan atau mengubahnya menjadi tantangan ST-1 : Perbaiki lingkungan untuk pengendalian kualitas	W+T :Perkecil Kelemahan dan hindari tantangan. WT-1:Menata penempatan tenaga SDM sesuai kemampuan di bidang tugas yang ditangani WT-2 : Penyediaan Pedoman dan Petunjuk Teknis



kurang 3. Adanya ancaman daya rusak jalan dan jembatan 4. Kurangnya peran serta masyarakat 5. Terbatasnya Biaya 6. Sulitnya pelaksanaan pembebasan tanah	jalan dan jembatan secara prioritas ST-3 Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut berperanserta menjaga jalan dan jembatan	pengelolaan jalan dan jembatan WT-3: Melaksanakan Pemeliharaan sarana dan prasarana untuk menghindari kerusakan dan dampak agar tidak semakin berkembang WT-4 : Meningkatkan pemeliharaan dan pengumpulan data/informasi
--	---	--

(4). Penentuan Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan (FKK)

Penentuan faktor-faktor kunci keberhasilan (FKK) adalah faktor-faktor yang sangat berpengaruh dalam perumusan strategi agar pelaksanaan MISI dapat lebih tajam, efektif dan efisien dalam mencapai VISI, yang diperoleh dari analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman maka diperoleh strategis secara berurutan adalah sebagai berikut :

1. Mengelola Pengembangan SDA melalui program RPJMD
2. Membangun, memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur melalui program RPJMD
3. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk menghindari kerusakan dan dampak agar tidak semakin berkembang.
4. Penyediaan Pedoman dan Petunjuk Teknis pengelolaan jalan dan jembatan
5. Meningkatkan pemeliharaan dan pengumpulan data/informasi
6. Perbaikan lingkungan untuk pengendalian kualitas jalan dan jembatan secara prioritas



7. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut berparteserta
8. Mengadakan Pelatihan SDM
9. . Menyusun Perda dan Standard Pengelolaan

3.4. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA.

Dalam hal ini dimaksudkan pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan management dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Pusat pertanggungjawaban berperan untuk menciptakan indikator kinerja sebagai dasar untuk menilai kinerja yang handal (reliable) merupakan suatu faktor kunci suksesnya organisasi.

Laporan Kinerja (LK) merupakan laporan deskriptif tentang pelaksanaan kinerja yang telah diprogramkan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara. Dalam laporan ini memuat tentang perbandingan antara indikator penilaian setiap kegiatan instansi



pemerintah. Perlunya laporan kinerja disebabkan ada kinerja yang tidak perlu dapat diukur secara angka-angka (kuantitatif) tetapi lebih jelas dengan deskriptif (kualitatif).

Informasi-informasi yang dihimpun yang dihimpun dalam penyusunan Laporan Kinerja bukan hanya memuat tentang finansial tetapi juga non finansial, sehingga laporan kinerja secara lengkap dapat menjelaskan tentang kinerja Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara.

3.4.1 Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan

1). Pelaksanaan Tugas

Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.34 Tahun 2006 tentang Jalan mengamanatkan bahwa Kewenangan Pembinaan Jalan Provinsi diserahkan kepada Pemerintah Provinsi, sedangkan Kewenangan Pembinaan Jalan Nasional diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, c/q. Direktorat Jenderal Bina Marga, untuk Provinsi Sumatera Utara, ditangani oleh Balai Besar Jalan Nasional di Medan.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44 / 31 / KPTS / 2012 Tanggal 19 Januari 2012 tentang penetapan ruas-ruas jalan dalam jaringan sekunder menurut fungsinya sebagai jalan kolektor 2 dan kolektor 3 ditetapkan bahwa panjang ruas jalan Provinsi yang berada di Sumatera Utara adalah.

Dalam pelaksanaan lelang, kelompok kerja (pokja) pelelangan diwajibkan memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa yang sudah di update dari Perpres 54 tahun 2010 dan Perubahan kedua yaitu Perpres 70 Tahun 2012 dan Perubahan Ketiga yaitu Perpres 04 Tahun 2015. Proses Pelelangan APBD telah dimulai pada bulan



Mei 2016 sampai dengan Juni 2016 dan pembukaan penawaran pada bulan Mei 2016 serta penetapan pemenang bervariasi mulai pada bulan Juni 2016. Penandatanganan kontrak fisik dimulai pada pertengahan Juni 2016 sampai dengan awal bulan Juli 2016.

3.5. PERMASALAHAN

Dalam penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan jalan dan jembatan di Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2016 selain faktor cuaca yang cukup dominan ditemukan juga bencana alam longsor dan banjir, ada beberapa kendala dan masalah yang ditemui antara lain :

1. Target yang ditetapkan dalam RPJMD dan RENSTRA Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan juga pada Perjanjian Kinerja TA. 2016 diartikan bahwa Pembangunan/Peningkatan Jalan sepanjang 338,50 Km serta Pembangunan/Penggantian Jembatan dengan total panjang 440,50 M membutuhkan anggaran sebesar **Rp. 1.116.650.000.000.-** (jalan Rp. 984.500.000.000,- dan jembatan Rp. 132.150.000.000.-) sementara anggaran yang tertampung pada APBD Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara pada TA. 2016 sebesar **Rp. 604.098.381.012.-** (jalan Rp. 501.725.381.012,- dan jembatan Rp. 102.373.000.000.-) yang digunakan untuk menangani pembangunan/peningkatan jalan sepanjang 127,40 Km dan Pembangunan/Penggantian jembatan sepanjang 375,00 M, sehingga pencapaian target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja TA. 2016 tidak tercapai.



2. Ketidak capaian target pada TA.2016 yang diakibatkan keterbatasan anggaran APBD Provinsi Sumatera Utara akan menambah beban pada tahun berikutnya guna pencapaian jalan mantap 95 % pada tahun 2018.
3. Pada perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 ada paket kegiatan yang pelaksanaannya melampaui tahun anggaran dengan masa denda dan pembayarannya dilakukan pada PAPBD TA. 2017 (*luncuran*).
4. Pada TA. 2016 ada 3 paket kegiatan yang harus dilakukan pemutusan kontrak sesuai dengan hukum kontrak yang berlaku, dan kepada Kontraktor dikenakan sanksi perusahaan daftar hitam (black list). Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah. Adapun paket kegiatan yang dilakukan pemutusan kontrak adalah :
 - a. Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Deli Tua - Tiga Juhar di Kab. Deli Serdang Sep. 2.50 Km
 - b. Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Batu Gajah - Bts. Pakpak Bharat di Kab. Humbang Hasundutan Sep. 2 Km
 - c. Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Tara Bintang - Parlilitan di Kab. Humbang Hasundutan Sep 2 Km

Adapun 5 paket kegiatan yang pelaksanaannya melampaui tahun anggaran dengan masa denda dan pembayarannya dilakukan pada PAPBD TA. 2017 (*luncuran*) :

- a. Pembangunan Jembatan Provinsi Sei Kera 1 pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Deli Tua - Tiga Juhar di Kab. Deli Serdang Sep. 7 m



- b. Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan T. Balai (Pangkal Tembok) - Pasar I - Bts. Labura di Kab. Asahan Sep. 3,50 Km
- c. Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Pasar XI - Silo Bonto - Pematang Sei Waru - Watas Kota Tj. Balai di Kab. Asahan Sep. 2 Km
- d. Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurs. Pasar I (Perbaungan) - Sei Dua - Psr. Banjar (Wts. Kota Tj. Balai) di Kab. Asahan Sep. 1,50 Km
- e. Pembangunan Jembatan Idano Fadoro Sohoya pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Afulu - Bts. Nias Barat Km. 114+050 di Kab. Nias Utara Sep. 8 m

Adapun 2 paket kegiatan yang batal :

- a. Penggantian Jembatan Sitolu-tolu pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Porsea - Bts. Asahan di Kab. Toba Samosir Sep. 7 m
- b. Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sei Buaya - Bts. Simalungun di Kab. Deli Serdang Sep. 1 Km

dan ada 5 paket kegiatan yang pelelangan gagal :

- a. Pembangunan Jembatan Provinsi Titi Gertak pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Jalan Marelan (Sp. Kantor - Bts. Deli Serdang) di Kota Medan Sep. 14 m
- b. Penggantian Jembatan Sei Titi Bendang-2 pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Kisaran - Air Joman - Wts. Tj. Balai di Kab. Asahan Sep. 7 m



- c. Penggantian Jembatan Sei Pasir Kecil pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Gertak Serong - Sarang Elang - Sei Sembilang - Watas Labura di Kab. Asahan Sep. 17 m
- d. Pembangunan Jembatan Aek Pasar Karom pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Jembatan Merah - Muarasoma di Kab. Mandailing Natal Sep. 7 m
- e. Pembangunan Jembatan Aek Nagaga pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Pulau Rakyat - Bts. Tobasa di Kab. Asahan Sep. 7 m

Dari seluruh kegiatan Program Utama sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2016 pada PAPBD dengan Anggaran sebesar Rp.504.726.369.053,- (pembangunan/peningkatan jalan 127,40 Km dan pembangunan/penggantian jembatan sepanjang 375 M) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 465.656.638.313.- atau 92,26 % dengan progress fisik 98,75 %.

3.6. SOLUSI

Adapun solusi dalam mengatasi permasalahan dengan cara :

1. Percepatan pelaksanaan tender dan kegiatan TA. 2016, dengan percepatan pelaksanaan tender maka pelaksanaan pekerjaan dapat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga pekerjaan yang dilaksanakan tidak ada yang mengalami putus kontrak.
2. Pada perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 ada 5 paket kegiatan yang pelaksanaannya melampaui tahun anggaran dengan masa denda dan pembayarannya akan dilakukan pada PAPBD TA. 2017 (*luncuran*).



BAB IV

PENUTUP

Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara telah mencoba berbuat secara maksimal dalam menyelenggarakan pembangunan dalam sektor prasarana jalan dan jembatan. Paradigma baru yang menekankan kepada Good Governance telah diupayakan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pembangunan dimaksud. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dijadikan modal dasar dalam setiap kegiatan, namun sebagai Dinas yang terus mengalami perubahan dan bergerak dinamis dengan mengikuti irama pembangunan, tentu dalam pelaksanaannya masih dapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan tugas yang secara terus menerus diupayakan untuk dikurangi sampai kemungkinan dapat dihilangkan.

4.1 Kesimpulan

1. Dinas Bina Marga dalam mengemban amanah berusaha yang terbaik untuk memajukan perekonomian Indonesia melalui Pembangunan Infrastruktur di daerah khususnya Sumatera Utara.
2. Dinas Bina Marga pada tahun 2016 memutuskan kontrakkan 3 (tiga) kegiatan, 5 (lima) kegiatan yang sisa pembayarannya luncheon, 2 (dua) kegiatan yang batal dan 5 (lima) kegiatan yang pelelangan gagal.
3. Keberadaan Aspal di pasaran terkadang tidak dapat kita prediksi, seperti di tahun 2016 tidak terjadi kelangkaan aspal karena adanya kerja sama dengan pemangku kepentingan.



4. Lambatnya penetapan harga satuan bahan dan upah yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota yang merupakan data awal bagi Dinas Bina Marga untuk mengolah menjadi data di Dinas Bina Marga.
5. Mengingatnya ruas jalan Provinsi yang mengalami kerusakan sebahagian diantaranya disebabkan jalan tersebut berada pada dataran tinggi dan pada jalur geologi yang memiliki patahan bumi, akibat hal ini sering terjadi bencana Alam anjlok atau longsor di beberapa ruas jalan serta banyaknya daerah yang memiliki potensi rawan bencana alam banjir.
6. Dinas Bina Marga tidak dapat melawan Kekuatan Alam, maka dari itu daerah yang mengalami bencana Alam, Dinas Bina Marga tetap menanganinya.
7. Dinas Bina Marga membentuk tim untuk mensertifikasi perusahaan-perusahaan yang mempunyai AMP dengan tujuan menjaga kualitas dan mutu Aspal.

4.2. Strategi Pemecahan Masalah Yang Akan Dilaksanakan Di Tahun Mendatang

1. Percepatan pelaksanaan tender dan kegiatan 2017
2. Pembinaan kepada Penyedia Jasa melalui Asosiasi-Asosiasi
3. Bekerja Sama dengan Pertamina dan Peyedia Aspal untuk Kesiapan pelaksanaan proyek 2017.
4. Sertifikasi terhadap perusahaan yang memiliki peralatan pencampur aspal atau AMP.



5. Memprioritaskan peningkatan jalan menuju daerah wisata serta daerah sentra produksi yang sangat strategis.
6. Tetap mempertahankan pemeliharaan jaringan Provinsi yang sudah ada agar tidak terjadi degradasi kualitas dan pelayanannya tetap nyaman.